

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 *Agency Theory*

Konsep *Agency Theory* menurut Moeljono (2005:27) adalah hubungan atau kontrak antara *Principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal* sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*.

Menurut Jimsly (2006:47) hubungan keagenan adalah sebagai kontrak dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut.

Teori keagenan mengemukakan antara pihak pemilik dan manajer memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan konflik yang dinamakan konflik keagenan (*agency conflict*). Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *principal* dan *agent* dalam hal terjadi konflik kepentingan (Moeljono, 2005:28).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent.

Agency Theory menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu hubungan kontrak (loosely defined) antara pemegang sumber daya. Suatu hubungan agency muncul ketika satu atau lebih individu, yang disebut pelaku (principals), mempekerjakan satu atau lebih individu lain, yang disebut agen, untuk melakukan layanan tertentu dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan utama agency dalam bisnis adalah mereka (antara pemegang saham dan manajer dan) 1 (2) antara debtholders dan pemegang saham. Hubungan ini tidak selalu harmonis, memang, teori keagenan berkaitan dengan konflik agency, atau konflik kepentingan antara agen dan pelaku. Hal ini memiliki implikasi untuk, antara lain, tata kelola perusahaan dan etika bisnis. Ketika agency terjadi cenderung menimbulkan biaya agency, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mempertahankan hubungan agency yang efektif (misalnya, menawarkan bonus kinerja manajemen untuk mendorong manajer bertindak untuk kepentingan pemegang saham). Oleh karena itu, teori keagenan telah muncul sebagai model yang dominan dalam literatur ekonomi keuangan, dan secara luas dibahas dalam konteks etika bisnis.

Agency Theory secara formal berasal pada awal tahun 1970, namun konsep di balik itu memiliki sejarah panjang dan beragam. Di antaranya adalah pengaruh teori properti-hak, ekonomi organisasi, hukum kontrak, dan filsafat politik, termasuk karya Locke dan Hobbes. Sebagian ilmuwan penting terlibat dalam periode formatif teori agensi di tahun 1970-an termasuk Armen Alchian, Harold Demsetz, Michael Jensen, William Meckling, dan S.A. Ross.

a. Konflik antara manajer dan pemegang saham

Agency Theory menimbulkan masalah mendasar dalam organisasi "perilaku mementingkan diri sendiri". Manajer Sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Karena manajer pemegang saham memiliki hak untuk mengelola aset perusahaan, sebuah potensi konflik kepentingan muncul antara dua kelompok.

b. Kebiasaan mementingkan diri sendiri

Agency Theory menunjukkan bahwa, tenaga kerja tidak sempurna dan pasar modal, manajer akan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka sendiri dengan mengorbankan para pemegang saham perusahaan. Agen memiliki kemampuan untuk beroperasi sendiri dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan terbaik dari perusahaan hal ini disebabkan oleh informasi yang bersifat asimetris (misalnya, manajer tahu lebih baik dari pemegang saham apakah mereka mampu memenuhi tujuan pemegang saham) dan ketidakpastian (misalnya, berbagai faktor memberikan kontribusi pada hasil-hasil akhir, dan mungkin tidak jelas apakah agen

langsung menyebabkan hasil yang diberikan, positif atau negatif). Bukti perilaku manajerial mementingkan diri sendiri termasuk konsumsi beberapa sumber daya perusahaan dalam bentuk perquisites dan menghindari risiko posisi yang optimal, dimana manajer menghindari risiko bypass peluang yang menguntungkan di mana pemegang saham perusahaan akan lebih memilih untuk berinvestasi. Di luar investor menyadari bahwa perusahaan akan membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka. Oleh karena itu, investor memberikan potongan harga dan mereka bersedia membayar perusahaan sekuritas.

Potensi konflik keagenan muncul setiap kali manajer perusahaan memiliki kurang dari 100 persen dari saham biasa perusahaan. Jika suatu perusahaan adalah kepemilikan tunggal yang dikelola oleh pemilik, manager pemilik akan melakukan tindakan untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri. Manajer-pemilik mungkin akan mengukur utilitas oleh kekayaan pribadi, tetapi mungkin memikirkan pertimbangan lainnya, seperti hiburan dan perquisites, terhadap kekayaan pribadi. Jika pemilik-manajer meninggalkan sebagian kepemilikan-nya dengan menjual sebagian saham perusahaan kepada investor luar, maka akan muncul potensi konflik kepentingan, yang disebut konflik keagenan. Sebagai contoh, pemilik-manajer lebih memilih gaya hidup yang lebih santai dan tidak bekerja keras untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, karena kurangnya kekayaan yang akan ditambahkan ke manajer-pemilik. Selain itu, manajer-pemilik lebih memutuskan untuk

mengonsumsi perquisites, karena beberapa manfaat dari biaya konsumsi akan ditanggung oleh para pemegang saham external.

Pada sebagian besar perusahaan publik bersekala besar, konflik kantor berpotensi cukup signifikan karena para manajer perusahaan sendiri umumnya hanya sebagian kecil dari saham biasa. Oleh karena itu, maksimalisasi kekayaan pemegang saham dapat disubordinasi untuk berbagai macam tujuan manajerial lainnya. Misalnya, manajer mungkin memiliki tujuan yang mendasar untuk memaksimalkan ukuran perusahaan. Dengan membuat sebuah perusahaan besar cepat berkembang, eksekutif meningkatkan status mereka sendiri, menciptakan lebih banyak kesempatan untuk manajer tingkat rendah sampai menengah dan gaji, dan meningkatkan keamanan kerja mereka karena suatu pengambilalihan cenderung tidak ramah. Akibatnya, manajemen incumbent dapat melakukan diversifikasi dengan mengorbankan para pemegang saham yang dapat dengan mudah mendiversifikasi masing-masing portofolio hanya dengan membeli saham di perusahaan lain.

Manajer dapat didorong untuk melakukan tindakan terbaik demi kepentingan pemegang saham melalui insentif, hambatan, dan hukuman. Bagaimanapun juga metode ini efektif hanya jika pemegang saham dapat mengamati semua tindakan yang diambil oleh manajer. Masalah moral mengambil untung semata, dimana agen mengambil tindakan tidak teramati dalam diri mereka untuk kepentingan-pribadi, yang berasal dari kelayakan bagi pemegang saham untuk memantau semua tindakan

manajerial. Untuk mengurangi masalah moral mengambil untung semata, pemegang saham harus menanggung biaya agen.

### 2.1.2 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan (*Ownership Structure*) adalah komposisi kepemilikan dalam perusahaan yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Menurut Iturriaga & Sanz (2000) struktur kepemilikan perusahaan adalah sebagai berikut:

“Struktur kepemilikan perusahaan merupakan tingkat kepemilikan saham pihak tertentu (manajemen/ institusional/ publik) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki salah satu pihak tersebut pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persen.”

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan (Nuryaman, 2008).

Struktur kepemilikan (*ownership structure*) merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. *Agency problem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara

manajemen dan pemegang saham. Dengan adanya pemisahan pengelolaan dan kepemilikan perusahaan maka pemilik akan memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang efisien (Faisal, 2005 dalam Raey Satea, 2012).

#### **2.1.2.1 Kepemilikan Manajerial (*Management Ownership*)**

Saham merupakan bentuk pendanaan jangka panjang yang tidak memiliki batas waktu pengembalian. Saham menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pemilik saham suatu perusahaan adalah pemegang saham, dan merupakan pemilik perusahaan. Tanggung jawab pemilik perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas pada modal yang disetorkan atau yang dimiliki (Husnan, 2004).

Ada berbagai kebijakan yang dapat diterapkan oleh para pemegang saham dalam mengatur distribusi modalnya atau kebijakan dalam membentuk struktur kepemilikan perusahaan yang mereka miliki. Ada sebagian perusahaan yang mengambil kebijakan kompensasi perusahaan bagi para manajernya dengan cara memberikan hak kepada para manajer untuk memiliki sebagian saham perusahaan (Ratnaningsih dan Hartono, 2001).

Kepemilikan manajer akan saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sebagai seorang pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh kelompok manajemen (Nuryaman, Rusmin, dan Ginting, 2010). Sedangkan menurut Boediono (2005) kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (komisaris dan direksi) (Machfoedz dan Midiastuty, 2003). Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajer yang mempunyai kepemilikan saham di perusahaan akan cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena terdapat kesamaan kepentingan antara keduanya. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Pada penelitian ini struktur kepemilikan manajerial merujuk pada pengertian yang diungkapkan Machfoedz dan Midiastuty (2003).

Berdasarkan teori keagenan, diketahui bahwa kepentingan manajer selaku pengelola perusahaan akan dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham (Elloumi dan Gueyie, 2001). Manajer dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya, berlawanan dengan upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini



menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Tingkat asimetri informasi akan cenderung relatif tinggi pada perusahaan dengan tingkat kesempatan investasi yang besar. Manajer atau pengelola perusahaan memiliki informasi privat tentang nilai proyek di masa akan datang dan tindakan mereka tidaklah dapat diawasi dengan detail oleh pemegang saham. Sehingga biaya agensi antara manajer dengan pemegang saham akan meningkat pada perusahaan dengan kesempatan investasi yang tinggi.

#### **2.1.2.2 Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)**

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara professional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. (Damayanti : 2011)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap

kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau malah memperburuk kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dapat menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat. (Djakman dan Machmud, 2008)

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional (Midiastuty dan Machfoedz, 2003). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan *investment banking* (Veronica dan Sinddharta, 2006). Dalam penelitian ini struktur kepemilikan institusional merujuk pada pengertian yang diutarakan Veronica dan Sinddharta (2005). Pada penelitiannya, yaitu kepemilikan institusional terbatas pada kepemilikan oleh institusi keuangan saja seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan *investment banking*.

Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip Sisca (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Investor institusional menurut Wien (2010) memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan investor individual, diantaranya yaitu:

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.
2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
3. Investor institusional, secara umum, memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.

### **2.1.3 Leverage**

Setiap perusahaan menginginkan adanya kelangsungan operasinya dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Salah satu keputusan penting yang harus

dilakukan manajer (keuangan) dalam kaitannya dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal.

Dalam manajemen keuangan leverage adalah penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensi pemegang saham, dituturkan Sartono (2001:257). Perusahaan yang menggunakan operating dan financial leverage dengan tujuan agar keuntungan yang di peroleh lebih besar daripada biaya asset dan sumber dana, dengan meningkatkan keuntungan pemegang saham.

Menurut Sutrisno (2009:198) bahwa:

Leverage adalah penggunaan aktiva atau sumber dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau beban tetap.

Kemudian Gitman (2003:508) : mengungkapkan penggunaan leverage bagi perusahaan sebagai berikut:

Akibat dari penggunaan dana tetap untuk memperoleh return bagi perusahaan. Secara umum pertumbuhan leverage akan menimbulkan peningkatan return dan risk bagi perusahaan. Sebaliknya penurunan leverage akan menurunkan return dan risk.

Sedangkan menurut Van horner dan Wachowiez, Jr (2005:440) menjelaskan bahwa:

“Dalam pengertian bisnis, leverage mengacu pada penggunaan aktiva tetap untuk meningkatkan keuntungan”

Dari pernyataan di atas menyatakan bahwa leverage bukan hanya digunakan untuk membiayai aktiva serta menanggung beban tetap melainkan juga memperbesar penghasilan.

Perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi berusaha menyampaikan lebih banyak informasi sebagai instrumen untuk mengurangi monitoring costs bagi investor. Mereka memberikan informasi yang lebih detail dalam laporan tahunan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang leverage nya lebih rendah.

Menurut Bringham dan Houston (2006:101) menyebutkan bahwa terdapat tiga implikasi penting dalam leverage, yaitu:

1. Dengan memperoleh dana melalui hutang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan.
2. Kreditor akan melihat pada ekuitas, atau dana yang diperoleh sendiri, sebagai suatu batas keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diperoleh dari pemegang saham, maka semakin kecil resiko yang harus dihadapi oleh kreditor.
3. Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayar, maka pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar

Perusahaan-perusahaan yang memiliki relatif hutang yang tinggi akan memiliki ekspektasi pengembalian yang juga relatif tinggi ketika perekonomian sedang berada dalam kondisi normal, namun memiliki resiko kerugian ketika ekonomi mengalami resesi. Oleh sebab itu, keputusan akan penggunaan hutang (*leverage*) mengharuskan perusahaan menyeimbangkan tingkat ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi dengan resiko yang meningkat.

#### **2.1.3.1 Tujuan Rasio *Leverage***

Rasio leverage digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang untuk membiayai sebagian dari aktiva perusahaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sutrisno (2009:198) yang menyatakan bahwa leverage adalah penggunaan aktiva atau sumber dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau beban tetap. Kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atas utang dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang berakhir dengan kebangkrutan perusahaan. Tetapi penggunaan utang juga memberikan subsidi pajak atas bunga yang dapat menguntungkan pemegang saham. Karenanya penggunaan utang harus diseimbangkan antara keuntungan dan kerugiannya.

#### **2.1.3.2 Mengukur Tingkat *Leverage***

*Leverage* menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Apabila perusahaan tidak mempunyai leverage artinya perusahaan

dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. Menurut Sutrisno (2009:217) untuk mengukur tingkat *leverage* yaitu:

1. *Total Debt to Total Asset Ratio*

Rasio total hutang dengan total aktiva yang biasa disebut dengan rasio hutang (*debt ratio*), mengukur prosentase besarnya dana atau aset perusahaan yang digunakan untuk mengukur besarnya *Debt Ratio*, yaitu:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{TotalLiabilities}}{\text{TotalAsset}} \times 100\%$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Rasio hutang dengan modal sendiri (*debt to equity ratio*) merupakan imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin sedikit dibandingkan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya besar hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini yaitu:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{TotalLiabilities}}{\text{TotalEquity}} \times 100\%$$

3. *Time Interest Earning Ratio*

Yang sering disebut juga dengan *coverage ratio* merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio ini mengukur sampai sejauh mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya, atau mengukur berapakah besarnya laba bisa menutupi beban bunganya. Semakin tinggi rasio itu maka akan semakin

baik kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Adapun rumus untuk mengukur Time Interest Earning Ratio, yaitu:

$$\text{Time Interest Earning Ratio} = \frac{EBIT}{\text{Beban Bunga}} \times 100\%$$

#### 4. *Fixed Interest Earned Ratio*

Rasio ini mengukur berapa kali kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban tetapnya seperti bunga dan pokok pinjaman, pembayaran sewa guna usaha dan deviden saham preferen dari hasil laba sebelum bunga dan pajak serta pembayaran sewa guna usaha. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini, yaitu:

$$\text{Fixed Interest Earned Ratio} = \frac{EBIT + \text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}$$

#### 5. *Debt Service Ratio*

Debt Service Ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt Service Ratio} = \frac{EBIT}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \frac{\text{Pembayaran Poko Pinjaman}}{(1 - \text{Tarif Pajak})}}$$

### 2.1.3.3 Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage suatu perusahaan. DER merupakan perbandingan hutang



yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Menurut Martono dan Agus Hartijo (2007:59) menyatakan bahwa DER merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri (ekuitas). Adapun rumus Debt to Equity Ratio (DER) yaitu:

$$DER = \frac{TotalDebt}{TotalEquity} \times 100\%$$

Semakin tinggi tingkat DER suatu perusahaan menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan semakin berat, yang pada akhirnya akan mengurangi hak pemegang saham (dividen). Dari berkurangnya hak para pemegang saham, maka minat investor dalam berinvestasi dalam perusahaan tersebut akan berkurang karena para investor akan memilih tempat berinvestasi yang memiliki resiko perusahaan yang rendah dan prospek keuntugan yang baik di masa depan.

#### **2.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)**

Seperti layaknya sebuah konsep yang tengah digandrungi, tidak ada satu definisi tunggal yang mampu menjabarkan pengertian dan ruang lingkup dari tanggung jawab sosial perusahaan. Versi *World Bank* :

*“CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.*

Di beberapa negara juga ikut mendefinisikan CSR, diantaranya sebagai berikut:

1. *CSR is about giving capacity building for sustainable livelihoods/ respects cultural differences and finds the business opportunities in building the skills of employee, the community and the government (Ghana).*
2. *CSR is about business giving back to community (Philipina).*
3. *CSR has been defined much more in terms of philanthropic model. Companies make profit, unhindered except by fulfilling their duty to pay taxes. Then they donate a certain share of the profit to charitable causes. It is seen as tainting the act for the company to receive any benefit from giving (US).*

(World Business Council for Sustainable Development, 2002)

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004).

Belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh berbagai lembaga. Beberapa definisi CSR di bawah ini menunjukkan keragaman pengertian CSR menurut berbagai organisasi, antara lain sebagai berikut : (Edi, 2007; Philip Kotler, 2008; Sukada dan Jalal, 2008).

1. *World Business Council for Sustainable Development*

CSR adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

2. *International Finance Corporation*

CSR adalah komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

3. *Institute of Chartered Accountants, England and Wales*

Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (*shareholders*) mereka.

4. *Canadian Government*

Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.

5. *European Commission*

Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa basis penerapan CSR adalah kesukarelaan dari perusahaan yang bersangkutan.

## 6. CSR Asia

Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.

Selain itu, ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* juga memberikan definisi. CSR adalah:

”Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh”.

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sesederhana sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup tujuh komponen utama, yaitu: *the environment, social development, human rights, organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer issues* (Sukada dan Jalal, 2008).

Sedangkan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mengemukakan bahwa model CSR membagi kewajiban perusahaan menjadi empat jenis tanggung jawab, yaitu :

- a. Ekonomis: mencetal laba (*profit*) bagi para pemilik saham.
- b. Legal : mematuhi segala peraturan dan hukum (yang berhubungan dengan lingkungan dan sebagainya).

- c. Etis : dalam berbisnis, berperilaku, sesuai dengan nilai luhur seperti kejujuran atau lainnya.
- d. Tanggung jawab lain yang sebenarnya bebas dipilih untuk dilaksanakan atau tidak (*discretionary responsibilities*) seperti pemberian beasiswa.

Menurut Suratmo (2008), di Indonesia saat ini yang begitu gencar melakukan program-program CSR masih seputar Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan-perusahaan asing. Tidak heran, BUMN memiliki kewajiban PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) sementara perusahaan asing selain karena kebijakan dari induk perusahaan, mereka juga memiliki kepentingan untuk menjaga suasana kerja tetap kondusif. Beberapa perusahaan swasta besar memang sudah menjalankan program CSR ini, namun aplikasi program ini ternyata belum menjadi prioritas bagi korporasi.

Dari berbagai macam definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu bentuk perwujudan komitmen perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat atas dasar kesadaran bahwa perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

#### **2.1.4.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Perusahaan kini menganggap bahwa pelaporan kinerja sosial dan lingkungan yang dilakukannya dianggap sama pentingnya dengan pelaporan kinerja ekonomi perusahaan. Sesungguhnya, pengungkapan kinerja perusahaan baik dari segi sosial

maupun dari segi lingkungan memiliki posisi yang sama dengan pengungkapan kinerja dari segi finansial, yaitu sebagai sumber informasi bagi para *stakeholders* dalam rangka pengambilan keputusan bisnis.

Menurut Gray, Kouhy and Lavers (1995) terdapat dua pendekatan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, pengungkapan sosial perusahaan mungkin diperlukan sebagai suplemen dari suatu aktivitas ekonomi konvensional. Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat keuangan sebagai pemakai utama pengungkapan tanggung jawab perusahaan dan cenderung membatasi persepsi tentang tanggung jawab sosial yang dilaporkan.

Pendekatan alternatif kedua, dengan meletakkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungannya dengan organisasi. Pendekatan yang luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Darwin (2004) tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial perusahaan tiap periode, yang tidak hanya berupa internalisasi *social cost* dan *social benefit*, tetapi juga pengaruh eksternalitas tersebut terhadap kelompok sosial yang berbeda.

2. Untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan secara langsung mempengaruhi sumber daya dan status kekuatan dari individu, masyarakat, kelompok sosial, dan generasi yang konsisten dengan prioritas sosial di satu sisi dengan aspirasi individu di pihak lain.
3. Untuk menyediakan secara optimal informasi-informasi yang relevan dengan unsur-unsur sosial dalam tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan sumbangan perusahaan terhadap tujuan sosial.
4. Untuk meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan dalam globalisasi dan/atau perdagangan bebas

Ada berbagai macam media yang dipilih oleh perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Lebih banyak perusahaan memilih laporan prospektus sebagai media pengungkapannya, karena laporan prospektus ini bisa digunakan sebagai saran propaganda untuk calon investor di Bursa. Pengungkapan tersebut minimal memberikan kesan bahwa perusahaan sudah memiliki kepedulian dalam pengelolaan lingkungan, sehingga adanya pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut dapat menarik para investor untuk membeli saham perusahaan.

Selain itu, tidak seragamnya cara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga diakibatkan oleh belum adanya peraturan yang jelas mengenai cara penyajian maupun komponen-komponen yang termasuk biaya sosial tersebut. Darwin (2004) menyatakan bahwa “untuk pelaporan dari aktivitas CSR yang dilakukan oleh

perusahaan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pengungkapan dalam laporan keuangan, melalui format terpisah, atau melalui audit sosial. Bila pelaporan sosial berbentuk pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun dalam format laporan tahunan (*annual report*), maka pelaporan tersebut harus mendukung peningkatan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Sebab, pengungkapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Sementara tujuan dari laporan keuangan sendiri adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang dapat dijadikan dasar atas *corporate social disclosure* (CSD)".

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan. Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2004, paragraf kesembilan :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Dampak sosial perusahaan tergantung pada jenis atau karakteristik operasi perusahaan. Karakteristik operasi perusahaan yang menghasilkan dampak sosial yang



tinggi akan menuntut pemenuhan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi pula. Pelaksanaan tanggung jawab sosial akan disosialisasikan kepada publik melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan.

Dalam proses pelaporan keuangan tahunan perusahaan, pengungkapan/*disclosure* merupakan aspek pelaporan yang kualitatif, yang sangat diperlukan pemakai informasi laporan keuangan. Karena sifatnya yang kualitatif sehingga formatnya tidak terstruktur, yang dapat terjadi secara langsung dalam laporan keuangan tahunan perusahaan melalui penjudulan yang tepat, catatan atas laporan keuangan ataupun berbagai sisipan seperti catatan kaki.

Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi CSR secara sukarela telah diteliti dalam penelitian sebelumnya, diantaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor (Deegan dan Blomquist, 2001; Hasnas, 1998; Ullman, 1985; Patten, 1992; dalam Basamalah, Anies, dan Johnny Jermias, 2005).

Pengungkapan CSR merupakan pengungkapan informasi terkait dengan aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan CSR diukur dengan proksi *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) berdasarkan indikator GRI G3.1 (*Global Reporting Initiatives Generation*). Variabel pengungkapan CSR perusahaan diukur dengan metode *content analysis*. *Content analysis* adalah suatu

metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen (Indriantoro dan Supomo, 2009) agar *content analysis* dapat dilaksanakan dengan cara yang *replicable*, maka dapat dilakukan salah satunya dengan cara *checklist*.

Item-item yang berkaitan dengan pengukuran pengungkapan tanggung jawab perusahaan antara lain :

1. Ekonomi (9 item)
2. Lingkungan (30 item)
3. Praktik Tenaga Kerja (15 item)
4. Hak Asasi Manusia (11 item)
5. Masyarakat (10 item)
6. Tanggungjawab Produk (9 item)

Sehingga total pengungkapannya adalah 84 *item* menurut GRI G3.1 yang dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk indeks pengungkapan sosial.

#### **2.1.4.2 Peraturan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Berbagai peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan antara lain sebagai berikut :

1. PSAK Nomor 33 pada subbab Pengelolaan Lingkungan Hidup paragraf 55, yaitu :

“Dengan adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup disekitar lokasi penambangan, meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- a. Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
- b. Perusakan lingkungan, yaitu adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat dan atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkesinambungan.

Sebagai usaha untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif dari kegiatan usaha penambangan, maka perlu dilakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yang meliputi upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup”.

2. (PSAK) No.1 (Revisi 2004) paragraf kesembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial, yaitu “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya

bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

3. Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas yang harus melaporkan perkembangannya sehubungan dengan tanggung jawab sosial dan juga pada masalah lingkungan, dan pasal 74 Undang-undang No.40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya dari sumber daya alam harus mempunyai tanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan. Hukuman akan dikenakan sebagai akibat pelanggaran pelaksanaannya menurut undang-undang yang terkait. Secara konsisten, segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran tersebut harus dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Undang-undang No.25 tahun 2007 Pasal 15 tentang Penanaman Modal ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

## **2.1.5 (Annual Report) Laporan Tahunan**

### **2.1.5.1 Pengertian Laporan Tahunan**

Teori tentang laporan tahunan (*annual report*) sangat jarang dikemukakan dalam literatur-literatur akuntansi, walaupun ada biasanya tergabung dalam topik laporan keuangan dan secara parsial tidak seluruhnya. Tetapi pada dasarnya, laporan tahunan adalah laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya dan biasanya di akhir tahun. Berikut ini adalah beberapa definisi laporan keuangan :

*"financial statement are the principle means through which financial information is communicated to the outside of the enterprise. These statement provide the firm's history, quantified in money terms. The financial statement most frequently provided are (1) the balance sheet, (2) the income statement, (3) the statement of cash flows, and the statement of owners' or stakeholders' equity. In additional, note disclosures are an integral part of each financial statement". (Kieso, Weygandt, 2004:2)*

Keseluruhan isi dari laporan tahunan diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan wajib disampaikan oleh setiap emiten yang terdaftar di Bursa Efek sebagai pelaporan kegiatan selama satu tahun sebelumnya. Laporan tahunan wajib diungkapkan oleh setiap perusahaan yang mencatatkan diri di bursa efek sebagai pelaporan kegiatan selama satu tahun sebelumnya kepada pihak-pihak yang berkentigan dengan perusahaan tersebut (*stakeholders*).

### **2.1.5.2 Tujuan Laporan Tahunan**

Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 revisi tahun 2009 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan

suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi :

- a. Asset,
- b. Liabilitas,
- c. Ekuitas,
- d. Pendapatan dan Beban termasuk Keuntungan dan Kerugian,
- e. Kontribusi dari dan Distribusi Kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai Pemilik, dan
- f. Arus Kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Menurut peraturan Bapepam tujuan dari laporan tahunan sebagai berikut :

1. Berguna bagi pemakai laporan tahunan dalam membuat keputusan investasi, masalah kredit atau keputusan-keputusan lainnya.

2. Menyediakan laporan komprehensif mengenai prospek perusahaan di masa depan, baik kegiatan operasi, keuangan, dan informasi-informasi relevan lainnya.
3. Menyediakan informasi mengenai klaim sumber daya perusahaan serta perubahannya.

Pemakai laporan keuangan terdiri dari investor sekarang, investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditur, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat yang menggunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Investor membutuhkan informasi untuk membantu dalam menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasinya. Pemegang saham tertarik pada informasi akuntansi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Investor merupakan penanam modal yang menanggung risiko perusahaan, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhannya akan memenuhi pula sebagian kebutuhan pemakai lain.

Namun demikian, laporan keuangan tidak dapat menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena hanya menggambarkan secara umum pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan dan dipertanggungjawabkan

manajemen bermaksud agar dapat membuat keputusan ekonomi seperti keputusan untuk menahan atau menjual investasi dalam perusahaan dan keputusan untuk mengangkat dan mengganti manajemen.

### **2.1.5.3 Peraturan Bapepam Mengenai Isi Laporan Tahunan**

Laporan tahunan di BEJ (Bursa Efek Jakarta) dan BES (Bursa Efek Surabaya) yang sekarang menjadi BEI (Bursa Efek Indonesia) diatur oleh Keputusan Ketua Bapepam No.38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan dan hanya mengikat bagi perusahaan publik saja. Bentuk dan isi dari laporan tahunan menurut Bapepam secara garis besar dibagi menjadi enam bagian, yaitu :

1. Ketentuan Umum, yang berisi peraturan fisik dan informasi yang wajib disampaikan emiten.
2. Laporan Manajemen, yang berisi penjelasan umum dan penjelasan khusus mengenai perusahaan.
3. Bagian mengenai ikhtisar Data Keuangan Penting, yaitu bagian dari laporan tahunan yang berisi informasi perbandingan keuangan lima tahun buku atau sejak memulai usahanya.
4. Bagian mengenai Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, yaitu bagian dari laporan tahunan yang berisi laporan singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan dan



perubahan-perubahan material yaitu sejak laporan tahunan terakhir atau sejak pernyataan pendaftaran diajukan.

5. Bagian mengenai Laporan keuangan, yaitu bagian laporan tahunan yang berisi laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan Bapepam dibidang akuntansi dan telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam.

Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham dan perusahaan publik, laporan tahunan wajib disampaikan ke Bapepam sebanyak empat rangkap dan tersedia para pemegang saham selambat-lambatnya 14 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.

Sedangkan untuk perusahaan yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat hutang wajib, disampaikan kepada Bapepam sebanyak empat rangkap selambat-lambatnya lima bulan setelah tahun buku perusahaan terakhir. Kewajiban ini berlaku selama efek bersangkutan belum dilunasi atau jatuh tempo.

#### **2.1.5.4 Komponen Laporan Keuangan**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 revisi tahun 2009 menyatakan Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode,
- b) Laporan laba rugi komprehensif selama periode,
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode,

- d) Laporan arus kas selama periode,
- e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya, dan
- f) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan.

Suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

#### **2.1.5.5 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan**

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan berbeda-beda dalam kondisi yang berbeda pula. Sebagai salah satu prinsip dalam akuntansi keuangan, kadangkala istilah pengungkapan dikaitkan secara langsung dengan laporan keuangan (*financial statement*). Dalam kenyataannya ternyata pengungkapan juga berhubungan dengan informasi lainnya di luar laporan keuangan.

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (Hendriksen, 1996, dalam Utomo, 2000). Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*), yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela

(*voluntary*), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Tujuan pengungkapan menurut Securities Exchange Commission (SEC) dikategorikan menjadi dua, yaitu : 1) *protective disclosure* yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor, dan 2) *informative disclosure* yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan (Wolk, Francis, dan Tearney, dalam Utomo, 2000). Ada dua jenis pengungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal (Darwin, 2004). Pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua, adalah pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada.

Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya sukarela. Karenanya, perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar modal. Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh entitas yang dikelola oleh manajer yang memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasan dalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat.

Dari definisi di atas maka istilah pengungkapan dapat digunakan baik dalam laporan keuangan maupun laporan yang lainnya dengan alat penelitian yang berbeda-

beda. Penelitian penulis memfokuskan pengungkapan pada laporan tahunan (*annual report*), bukan pada laporan keuangan (*financial statement report*).

PSAK No.1 menganjurkan perusahaan menyajikan telaah keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian. Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan tambahan (*value added statement*), khususnya bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya memang secara khusus diatur dalam PSAK, sedangkan informasi lain yang tersedia di laporan tahunan, seperti hasil analisis dan diskusi manajemen tidak diatur secara langsung oleh PSAK, tetapi oleh regulator bursa, dalam hal ini adalah Bapepam.

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Thn	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Rawi	2008	<i>Corporate social responsibility</i> , Kepemilikan manajemen, Kepemilikan institusi, <i>Leverage</i> .	Regresi	Kepemilikan manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan

				institusi dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Rustiarini	2010	<i>Corporate social responsibility</i> , Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi	Regresi	Kepemilikan Manajemen dan Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR.
Wijaya	2012	<i>Corporate social responsibility</i> , Ukuran Dewan Komisaris, <i>Leverage</i> , <i>Firm Size</i> , Profitabilitas, Kinerja Lingkungan.	Regresi	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengungkapan CSR.
Ainullia	2013	<i>Corporate social responsibility</i> , Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi, <i>Leverage</i>	Regresi	Kepemilikan Manajemen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR, kepemilikan Institusi dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR.
Setiawati, Zulfikar, dan Artha	2013	<i>Corporate social responsibility</i> , <i>firm size</i> . Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajemen.	Regresi	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, Kepemilikan Manajemen Berpengaruh Terhadap pengungkapan CSR.

Melati	2014	<i>Corporate social responsibility</i> , Dewan Komisaris, <i>Media Exposure</i> , Kepemilikan Asing, Independensi Komite Audit, Kepemilikan Manajemen, Kinerja Keuangan	Regresi	Kepemilikan Manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan CSR.
Indika	2014	<i>Corporate social responsibility</i> , Struktur Kepemilikan, <i>Leverage</i>	Regresi	Kepemilikan Manajemen dan Kepemilikan Institusi berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan CSR, <i>Leverage</i> berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Fima	2014	<i>Corporate social responsibility</i> , Dewan Komisaris, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Size</i> , Kepemilikan <i>Institutional</i> , Kepemilikan Saham Publik	Regresi	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR, Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR.
Yuliani	2014	<i>Corporate social responsibility</i> , Struktur Kepemilikan Saham, Karakteristik Perusahaan	Regresi	Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR, <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan

				CSR.
Setyowati	2015	<i>Corporate social responsibility</i> , Kepemilikan Manajemen, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan	Regresi	Kepemilikan Manajemen tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR, <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan CSR,
Maulidra	2015	<i>Corporate social responsibility</i> , Struktur Kepemilikan Saham, <i>Leverage</i>	Regresi	Kepemilikan Manajemen berpengaruh signifikan negatif terhadap Pengungkapan CSR, Kepemilikan Institusi dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pengungkapan CSR.
Prakasa dan Astika	2016	<i>Corporate social responsibility</i> , <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Kepemilikan Manajemen	Regresi	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR, Kepemilikan Manajemen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR.
Alfarizi	2016	<i>Corporate social responsibility</i> , Media Exposure, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Struktur Kepemilikan Saham	Regresi	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan CSR, Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh

				terhadap Pengungkapan CSR.
Zia dan Wahidahwati	2016	<i>Corporate social responsibility</i> , Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan, <i>Good Corporate Governance</i>	Regresi	<i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusi dan Kepemilikan Manajemen berpengaruh tidak signifikan terhadap CSR.

Rawi (2008) melakukan penelitian dengan variabel *independen* kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, *leverage* dan variabel *dependen* yang diteliti yaitu CSR, dengan hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemilikan manajemen terhadap *corporate social responsibility*, yaitu dengan nilai *p-value* sebesar 0.005 atau dibawah *level of significance* ( $\alpha= 0.05$ ), yang berarti bahwa semakin besar kepemilikan manajemen, maka pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin luas. menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham manajemen yang tinggi, maka lebih banyak melakukan aktivitas sosial dan lingkungan karena mereka menganggap masyarakat eksternal memperhatikan kondisi lingkungan akibat kegiatan operasi perusahaan. Hasil analisis data menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusi terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, yaitu dengan tingkat *p-value* sebesar 0.207 atau diatas *level of significance* ( $\alpha= 0.05$ ), yang berarti bahwa semakin besar kepemilikan institusi, pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak selalu selalu luas. Hasil



ini tidak mendukung teori *stakeholder*, bahwa *stakeholder theory* yang menyatakan bahwa *stakeholder* merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang dapat *stakeholder* mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda variabel *leverage* tidak ada pengaruh yang signifikan antara *leverage* terhadap CSR, yaitu dengan nilai *p-value* 0.113 atau di atas *level of significance* ( $\alpha = 0.05$ ), yang berarti bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan, maka pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda yaitu dengan uji t bahwa secara simultan variabel *independen* mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi variabel *dependen*. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai F hitung yaitu sebesar 2.397 dan dengan nilai signifikan sebesar 0.029 atau kurang dari batas nilai signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa dalam menjelaskan pengungkapan CSR maka variabel kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, dan *leverage* dapat digunakan secara bersama-sama.

Rustiarini (2010) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu variabel kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR dengan hasil uji asumsi klasik dilakukan menggunakan tiga uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas menunjukkan tingkat signifikansi di atas 0,05 yang berarti bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini

berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai toleransi lebih dari 10% dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansinya diatas 5% sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini. Nilai R sebesar 0,504 menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara variabel *independen* dengan variabel *dependen* sebesar 50,4%. Artinya variabel struktur kepemilikan mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel pengungkapan CSR karena diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,5. Nilai F menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengungkapan CSR. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh pada pengungkapan CSR yang diproksikan dengan CSRI. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial pada pengungkapan CSR yang diproksikan dengan CSRI, dengan kesimpulan akhir yaitu kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Wijaya (2012) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu variabel leverage dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR, dengan uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji kelayakan model persamaan regresi dan untuk mengetahui

apakah secara parsial variabel *independen* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependen*.

#### 1. Koefisien determinasi

Hasil *output* koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0,182, yang berarti apabila dikalikan seratus persen maka kemampuan variabel-variabel independennya menjelaskan variabel dependennya sebesar 18,2%.

#### 2. Uji Goodness of Fit (F)

Dari uji F didapatkan nilai F sebesar 2,423 dengan nilai signifikansi 0,061 (6,1%). Maka koefisien regresi secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3. Uji t (Uji parsial)

*Leverage* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan karena nilai signifikannya lebih dari 0,05.

Dengan hasil akhir yaitu variabel *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Ainullia (2013) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu variabel kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, *leverage* dan yang menjadi variabel dependen yaitu CSR, dengan hasil Kepemilikan saham manajemen berpengaruh positif terhadap indeks pengungkapan CSR dalam laporan keuangan dengan nilai t hitung sebesar 3,668 diterima pada taraf signifikansi 5% ( $p < 0,05$ ) dan H1 diterima atau terdukung. Artinya perusahaan yang kepemilikan

saham manajemennya tinggi cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas daripada perusahaan dengan kepemilikan saham manajemen yang rendah. Kepemilikan saham institusi tidak berpengaruh terhadap indeks pengungkapan CSR dalam laporan keuangan dengan nilai t hitung = 1,113 ditolak pada taraf signifikansi 5% ( $p > 0,05$ ) dan H2 ditolak atau tidak terdukung. Artinya perusahaan yang kepemilikan saham institusinya tinggi tidak berdampak pada keluasan laporan pertanggungjawaban sosial. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap indeks pengungkapan CSR dalam laporan keuangan dengan nilai t hitung = -0,077 ditolak pada taraf signifikansi 5% ( $p > 0,05$ ) dan H3 ditolak atau tidak terdukung. Artinya perusahaan yang leverage-nya tinggi tidak berdampak pada keluasan laporan pertanggungjawaban sosial.

Setiawati, Zulfikar, dan Artha (2013) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu kepemilikan manajemen dan *leverage*, dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR. Variabel *leverage* menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,764 dengan nilai sig 0,121 > 0,05 (•), maka H3 ditolak artinya *leverage* secara individu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai thitung sebesar -26,463 dengan nilai sig 0,018 < 0,05 ( $\alpha$ ), maka H5 diterima artinya kepemilikan manajerial secara individu berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Melati (2014) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu kepemilikan manajemen dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR berdasarkan nilai t hitung  $0.367 < t_{tabel} 1.9824$  dan nilai signifikansi sebesar  $0.715 > 0.05$ , maka disimpulkan H5 ditolak, artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Indika (2014) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, *leverage*, dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR. Berdasarkan hasil nilai F hitung sebesar 4,565 lebih besar dari F tabel sebesar 2,66 dan signifikan dengan nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dibuktikan secara empiris bahwa struktur kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan *leverage* secara bersama-sama mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dengan nilai signifikan sebesar 0,002 menunjukkan bahwa pengaruh seluruh variabel *independen* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Ulyfah Fima (2014) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu kepemilikan institusi, dan *leverage*, dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan nilai signifikan sebesar 0,302 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Variabel *leverage*

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ .

Yuliani (2014) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu kepemilikan institusi, dan *leverage*, dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR. Hasil pengujian parsial (Uji t) untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* menunjukkan thitung sebesar -1,300 dengan nilai signifikansi adalah 0,202 dan ttabel 2,026. karena  $t \text{ hitung } -1,300 < 2,026$  dan nilai sig  $0,202 > 0,05$ , sehingga hasil pengujian  $H_0$  gagal ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil pengujian parsial (Uji t) untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* menunjukkan thitung sebesar -2,181 dengan nilai signifikansi adalah 0,039 dan ttabel 2,026. Karena thitung  $2,181 > 2,026$  dan nilai sig  $0,039 < 0,05$ , sehingga hasil pengujian  $H_0$  berhasil ditolak. Dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dari uji Anova atau Uji F nilai Fhitung = 3,821 dan Ftabel sebesar 2,630 dan nilai sig = 0,011. Nilai F hitung akan dibandingkan dengan nilai Ftabel. Karena nilai Fhitung = 3,821 > Ftabel sebesar 2,630 dan selain itu nilai sig = 0,011 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) pengungkapan *corporate social responsibility* dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, dan *leverage*.

Setyowati (2015) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu kepemilikan manajemen, dan *leverage*, dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR. Variabel kepemilikan manajemen yang diproksi dengan presentase total saham manajemen yaitu saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Coporate Social Responsibility* dengan nilai signifikansi sebesar 0,393. Variabel *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan nilai signifikansi sebesar 0,001.

Maulidra (2015) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, dan *leverage*, dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR. Hipotesis pertama penelitian ini adalah Proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2010-2012. Memiliki nilai thitung sebesar 3.087 > ttabel 1,984 dan nilai sig sebesar 0,003. Nilai sig (0,003) < (0.05) dengan nilai negatif pada angka 0,244, ini berarti variabel kepemilikan saham manajerial signifikan dan negatif pada level 5% dan H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan saham manajerial secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak. Hipotesis Kedua penelitian ini adalah Proporsi kepemilikan Institutional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2010-

2012. Memiliki nilai  $t$  sebesar 0,384 dan nilai sig. 0,702.  $t_{hitung}$  sebesar  $0,384 < t_{tabel}$  1,984 dan nilai sig  $(0,702) > (0,05)$ , ini berarti bahwa variabel kepemilikan institutional tidak signifikan pada level 5% dan H2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institutional secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak. Hipotesis selanjutnya penelitian ini adalah *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2010-2012. Memiliki nilai  $t$  sebesar 0,304 dan nilai sig 0,762. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,304 < t_{tabel}$  1,984 dan nilai sig  $(0,762) > (0,05)$ , hal ini berarti variabel *leverage* yang diukur dengan rasio DER tidak signifikan pada level 5% dan H4 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Prakasa dan Astika (2016) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu kepemilikan manajemen dan *leverage*, dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR. Kepemilikan manajemen terhadap CSR *disclosure*. Terdapat nilai signifikan 0,008. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai  $0,008 < 0,05$  maka H3 diterima. Variabel kepemilikan manajemen mempunyai  $t$  hitung 2,800 bertanda positif menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajemen mempunyai hubungan yang searah dengan variabel pengungkapan CSR. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajemen



berpengaruh terhadap CSR *disclosure*. *Leverage* terhadap CSR *disclosure*. Terdapat nilai signifikan 0,310. Nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai  $0,310 > 0,05$  maka H1 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap CSR *disclosure*. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka semakin rendah CSR *disclosure* perusahaan.

Alfarizi (2016) ) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu kepemilikan institusi dan *leverage*, dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR. Hasil uji parsial menunjukkan variabel Kepemilikan Instusional mempunyai nilai sig  $0.934 > 0.05$  dan nilai koefisien regresi 0.83 yang berarti variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dengan demikian kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility* dinyatakan ditolak. Hasil uji parsial menunjukkan variabel *leverage* mempunyai nilai sig  $0.000 < 0.05$  dan nilai koefisien regresi -6.186 yang berarti variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility*. Dengan demikian *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility* dinyatakan ditolak.

Zia dan Wahidahwati (2016) melakukan penelitian dengan variabel *independen* yang sama dengan penelitian ini yaitu kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi dan *leverage*, dan yang menjadi variabel *dependen* yaitu CSR. Uji Parsial Pengaruh Kepemilikan Manajemen Terhadap *Corporate Social*

*Responsibility* dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh tingkat signifikan variabel kepemilikan saham manajerial sebesar  $0,728 > \alpha = 0,050$  (level of signifikan), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Kondisi ini menunjukkan pengaruh variabel tersebut terhadap *corporate social responsibility* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia adalah tidak signifikan. Uji Parsial Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Corporate Social Responsibility* dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh tingkat signifikan variabel kepemilikan saham institusional sebesar  $0,800 > \alpha = 0,050$  (level of signifikan), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Kondisi ini menunjukkan pengaruh variabel tersebut terhadap *corporate social responsibility* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia adalah tidak signifikan. Uji Parsial Pengaruh *Leverage* Terhadap *Corporate Social Responsibility* dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh tingkat signifikan variabel *leverage* sebesar  $0,564 > \alpha = 0,050$  (level of signifikan), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan kesimpulan akhir kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, dan *leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini akan menganalisis apakah struktur kepemilikan dan leverage mempengaruhi CSR. Struktur kepemilikan terdiri dua jenis saham pemegang saham, yaitu kepemilikan manajemen, yang mana merujuk pada perusahaan itu sendiri. Dan pemegang saham lainnya yaitu lembaga (institusi) atau pemegang saham individu, yang tidak bergabung dengan perusahaan. Pemegang saham gabungan adalah

pemegang saham yang reputasi, identitas, atau turun temurun yang berhubungan dengan perusahaan, sementara pemegang saham yang non gabungan adalah mayoritas pemegang saham yang mempunyai saham di perusahaan sebagian dari diversifikasi portofolio dan yang hubungannya dengan perusahaan tidak berlanjut, karena pengaruh dari nilai portofolio mereka.

Diamond (1991) dan Gilson (1990) dalam Rawi dan Munawar (2010) menyatakan bahwa tingginya tingkat suku bunga utang juga mendorong kreditur untuk berperan aktif untuk mengawasi perusahaan (manajemen), dimana utang memberikan sinyal tentang status kondisi keuangan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur schipper (1981) dalam Anggraini (2006). Belkaoui dan Karpik (1989) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat rasio leverage, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi, maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial.

### **2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Corporate Social Responsibility**

Pada literatur menunjukkan bahwa para manajemen tetap pada tingkat kepemilikan yang relative kecil (Morck, Shleifer dan Vishny: 1988), Selain tingkat kepemilikan yang tetap, peningkatan pada kepemilikan manajemen dilakukan untuk

mendapatkan batasan keuntungan dari manajemen dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Jika pengeluaran untuk CSR berada pada suatu titik yang mana akan mengurangi nilai perusahaan, maka batasan yang ada telah dicapai, maka dapat ditemukan pengaruh negatif kepemilikan manajemen terhadap pengeluaran CSR. (Hartzell dan Starks: 2003) dan (Bhojraj dan Sengupta: 2003) menyatakan sebagian kecil penanam saham individu tidak mempunyai pengaruh yang banyak dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, ada beberapa bukti bahwa lembaga / perusahaan juga berperan dalam mengurangi konflik kepentingan.

Demsetz (1983) dan Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula untuk melakukan program CSR. Morck, Shleifer dan Vishny (1988) menyatakan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pelaksanaan CSR dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan, tetapi pada suatu titik yang mana akan mengurangi nilai perusahaan dan batasan yang telah dicapai, ditemukan hubungan negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) menggunakan factor ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, ukuran dewan komisaris dan *leverage* sebagai variabel independennya. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan, tipe industri dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan variabel profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) menggunakan factor kepemilikan manajemen, *financial leverage*, ukuran perusahaan tipe industri dan profitabilitas sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan ukuran perusahaan, *financial leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Rustiarini (2009) yang menguji pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap pengungkapan CSR. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Penelitiannya menggunakan *Corporate Social Responsibility Index (CSRI)* untuk mengukur pengungkapan CSR yang didasarkan pada indikator kebijakan Bapepam. Sampel penelitiannya menggunakan 56 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada *Indonesia Stock Exchange (IDX)* pada tahun 2008. Penelitian itu menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Penelitian tersebut menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal itu mengindikasikan struktur kepemilikan asing dalam penelitiannya memiliki kepedulian terhadap pengungkapan CSR dalam keputusan investasi.

### **2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Corporate Social Responsibility**

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku opportunistic manajer. Kepemilikan institusional menurut Soliman et al. (2012) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi juga akan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu aktivitas yang dimonitor oleh investor institusi karena dianggap sebagai aktivitas positif yang digunakan untuk memperoleh legitimasi masyarakat. Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang tinggi.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa investor memerlukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai alat informasi untuk mereka membuat keputusan investasi (Mahoney dan Roberts, 2007; Epstein dan Freedman, 1994). Cox *et al*, (2004) menemukan bahwa CSR berhubungan positif dengan investasi jangka panjang kelembagaan. Selain dari itu, temuan dari penelitian terbaru oleh Mahoney dan Roberts (dalam Saleh *et al*, 2010) juga melaporkan ada hubungan yang signifikan antara perusahaan yang melakukan praktek CSR dengan kepemilikan institusional.

Grief dan Zychowicz (1994) dalam penelitiannya bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dari persentase saham yang dimiliki oleh institutional

investor akan menyebabkan tingkat monitor lebih efektif, dengan demikian semakin tinggi kepemilikan institusi, maka untuk program CSR terbatas.

Hasil ini diperkuat dari penelitian yang dilakukan oleh Yong Oh, dkk (2011) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara CSR dan kepemilikan institusional. Soliman (2012) dalam Yuliani (2014) yang mana menemukan adanya hubungan yang positif antara kepemilikan saham institusional dengan pengungkapan *corporate social responsibility*. Artinya semakin besar kepemilikan institusional semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya hubungan timbal balik yang kuat antara tanggung jawab perusahaan dengan pihak luar (masyarakat).

Machmud dan Djakman (2008) yang meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan CSR. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menyelidiki pengaruh kepemilikan asing dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan periode tahun 2006. Sampel penelitiannya adalah 107 laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* pada tahun 2006. Penelitiannya menggunakan analisis regresi untuk melakukan pengujian. Hasil penelitian itu menemukan bahwa baik kepemilikan asing maupun kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedua struktur kepemilikan tidak terlalu peduli dengan pengungkapan CSR dalam melakukan keputusan investasi.

Saleh, *et al* (2010) yang menguji pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* secara keseluruhan beserta menguji juga keempat dimensi CSR secara terpisah pada pengaruhnya terhadap tingkat kepemilikan institusional. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara pengungkapan CSR dengan kepemilikan institusional pada perusahaan – perusahaan *go public* di Malaysia. Pengujian hipotesis pada penelitian itu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data laporan tahunan perusahaan sebagai sampel analisis. Yang mana mereka menemukan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* secara keseluruhan dimensi, dimensi CSR relasi karyawan, dan dimensi CSR produk memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepemilikan institusional. Sedangkan dimensi CSR keterlibatan komunitas sekitar dan dimensi CSR lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepemilikan institusional.

Rinaldy (2011) yang meneliti pengungkapan CSR terhadap tingkat kepemilikan institusional di Indonesia. Penelitian itu bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pengungkapan CSR pada kepemilikan institusional. Penelitian itu menggunakan data perusahaan yang berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan *go public* berkategori *high-profile* yang mencakup periode pelaporan pada tahun 2008 dan tahun 2009. Penelitian itu menggunakan 4 variabel independen yaitu CSR dimensi karyawan, CSR dimensi keterlibatan dengan komunitas sekitar, CSR dimensi produk, dan CSR dimensi lingkungan. Variabel terikat dalam penelitian itu



adalah kepemilikan institusional. Sampel dalam Penelitiannya menggunakan 61 perusahaan high-profile yang berkepemilikan institusional serta menggunakan analisis regresi berganda dengan program pengolahan SPSS 16. Hasil penelitian itu menemukan bahwa variabel CSR dimensi keterlibatan dengan komunitas dan CSR dimensi lingkungan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepemilikan institusional, sedangkan CSR dimensi hubungan dengan karyawan dan CSR dimensi produk adalah berpengaruh positif dan signifikan.

### **2.2.3 Pengaruh Tingkat Leverage terhadap *Corporate Social Responsibility***

Pengaruh variabel *leverage* terhadap CSR menurut teori legitimasi yaitu semakin besar utang perusahaan kepada kreditur maka semakin sedikit biaya yang tersisa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang terpenting bagi perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi adalah perusahaan dapat memperoleh utang dengan mudah dan dapat dengan mudah pula melunasinya, sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung mengesampingkan pengungkapan tanggung jawab social perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah.

Struktur modal dari sebuah perusahaan dapat mempengaruhi pengeluaran atas biaya CSR. Saat perusahaan mempunyai utang bunga yang tinggi, kemampuan manajemen untuk berinvestasi lebih pada program CSR adalah terbatas. Komposisi modal atau pendanaan perusahaan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab

sosial. Belkaoui Dan Karpik (1989) mengasumsikan perjanjian keuangan yang bersifat membatasi, bahwa persetujuan dalam utang perusahaan bisa membatasi perpindahan kekayaan oleh manajemen antara pemegang saham dan debtholders, dan mengusulkan hipotesis jika utang besar, aktivitas social dan pengungkapan yang terkait dengannya mungkin dikurangi. Kemudian mereka menguji hubungan antara leverage (total utang/total harta) dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil mereka mendukung hipotesis bahwa leverage yang lebih tinggi mempunyai hubungan negatif ke CSR.

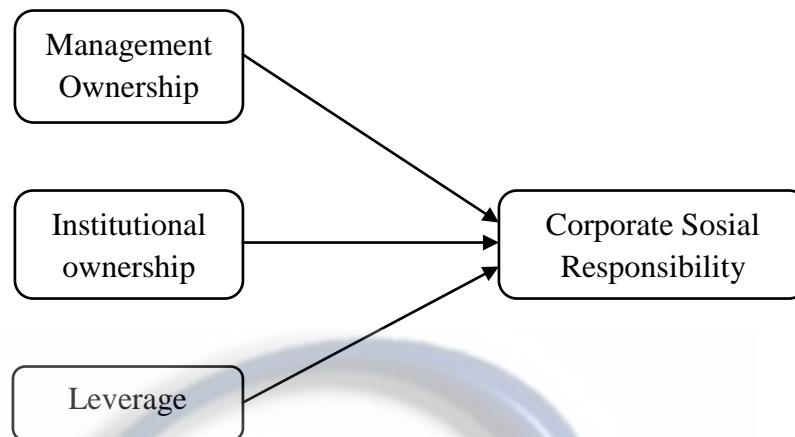
Sembiring (2003) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Sedangkan Prayogi (2003) menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial. Jensen (1986) dan Zweibel (1996), menyatakan bahwa saat perusahaan mempunyai utang bunga yang tinggi, kemampuan manajemen untuk berinvestasi lebih pada program CSR adalah terbatas. Biaya CSR yang terbatas, maka pengungkapan informasi sosial menjadi rendah atau terbatas. Dengan demikian leverage diprediksikan berhubungan negatif terhadap CSR. Sedangkan Anggraini (2006) dan Anggita Sari (2012) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara *leverage* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2012), Dewi dan Keni (2012), dan Chuzairi (2013) yang menemukan bahwa *leverage* dengan menggunakan pengukuran *Debt to Equity* (DER) menunjukkan hasil bahwa *leverage*

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten yang dilakukan oleh Novrianto (2012) menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dengan harapan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas (termasuk didalamnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan) dibanding perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Arthana (2012) menggunakan kepemilikan saham publik, *leverage*, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel independennya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan saham publik, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh negative terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Sari (2012) menggunakan tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel independennya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tipe industri berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi *leverage* dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teoritis Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Institusi, dan**  
***Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility***

### 2.3 Hipotesis

Dari perumusan masalah yang ada, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : *Management ownership, institutional ownership, dan leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility*.

Hipotesis 2 : *Management ownership* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility*

Hipotesis 3 : *Institutional Ownership* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility*

Hipotesis 4 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate sosial responsibility*